

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang menjadikan sektor publik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Menurut Christia (2019) Misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsekuensi penyerahan kewenangan ini di satu sisi daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan potensi yang dimiliki, tetapi di sisi lain mengandung tanggungjawab yang besar atas keberhasilan suatu pelaksanaan otonomi daerah (Lestari, 2021). karena menurut asas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Abdullah (2017) anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sistem penganggaran pada pemerintah Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Pengelolaan APBD yang baik penerapannya

ditunjang dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Magno, 2017).

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan proses kinerja yang lebih bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas yang menggambarkan seberapa akuntabel kinerja pemerintah. Maka menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Gumelar (2021) SAKIP diimplementasikan dimulai sejak penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). SAKIP merupakan salah satu alat manajemen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah terdesentralisasi yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah.

Tabel 1.1 Tingkat Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpetasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: www.menpan.go.id

Penjelasan dari masing-masing predikat adalah sebagai berikut:

AA : Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.

A : Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB : Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

B : Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

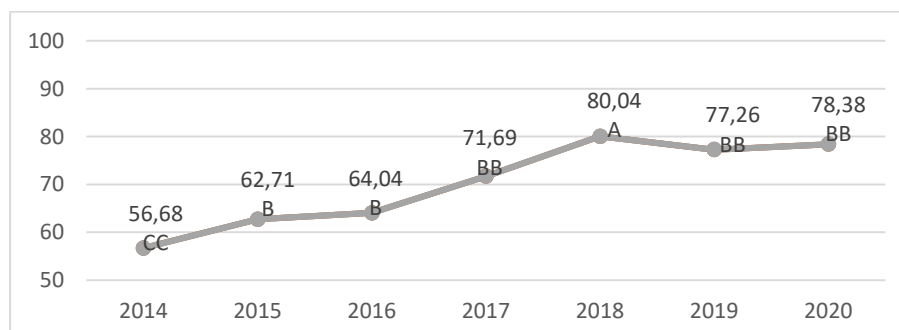
CC : Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C : Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

D : Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.

Gambar 1.1

Grafik Nilai Sakip Kabupaten Sidoarjo



Sumber: www.sidoarjokab.go.id

Menurut data yang diambil dari situs resmi www.sidoarjoab.go.id, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2018 memperoleh nilai SAKIP yang terus meningkat. Namun ditahun 2019 terdapat penurunan nilai SAKIP sebesar 2,78 dibandingkan dengan perolehan nilai SAKIP pada tahun 2018. Pada 2018 Kabupaten Sidoarjo berhasil mendapatkan predikat A dengan perolehan nilai absolut SAKIP sebesar 80,04. Namun, setelah mendapatkan predikat A di tahun 2018, ternyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mempertahankan predikat tersebut ditahun 2019 dikarenakan telah terjadi penurunan nilai SAKIP dengan nilai sebesar 77,26 atau mendapatkan predikat BB. Pada tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan predikat A untuk perolehan nilai SAKIP namun masih mendapatkan predikat BB dengan kenaikan nilai 1,12. Hal ini menandakan bahwa masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah dan masih perlu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya maka dibuatlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Menurut Kartika & Sukanto (2019) menyebutkan LKPD dapat dikatakan berkualitas jika laporan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sejalan dengan Bastian (2010: 138) penerapan SAP yang sesuai dalam pelaporan keuangan daerah merupakan penentu kualitas dari LKPD yang dihasilkan, dan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. SAP dijadikan pedoman dalam

melakukan pelaporan transaksi yang terjadi pada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Mahmudi (2011:271) SAP diperlukan untuk meningkatkan kualitas LKPD yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan.

Laporan keuangan memerlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sebuah sistem akuntansi. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki instansi pemerintahan (Aditya, 2017). Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian intern adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan yang berlaku dan peningkatan kegiatan operasi secara efektif dan efisien.

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang melakukan pengarahan, pengawasan serta penilaian sumber daya dalam sebuah lembaga dengan maksud untuk melakukan pendeteksian atas tindakan kecurangan atau penyelewengan (Asniar, 2020). Sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pane, 2018). Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem yang diterapkan secara serentak di lingkungan pemerintahan Pusat maupun pemerintahan daerah. Tercapainya sistem pengelolaan keuangan Negara secara akuntabel, harus didukung oleh adanya kewajiban dari pemimpin lembaga seperti Gubernur, Walikota/Bupati untuk menerapkan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan.

Kompetensi staf akuntansi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan (Fadli, 2022). Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kriteria atau existensi suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor lainnya selain pengendalian internal yang baik didalam sebuah instansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan hendaknya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai

produktivitas yang tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu aset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Wardani, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan SPIP dan Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SAKIP telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti (Ayu, 2022) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, SPIP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan. Berbeda dengan peneliti (Biilqis, 2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian (Bayu, 2015) yang sejalan dengan peneliti (Kurniawati, 2017) menjelaskan bahwa Kualitas SDM dan SPIP tidak mempengaruhi SAKIP. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Gumelar, 2021) menguji pengaruh SPIP sebagai variabel pemoderasi menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan.

Dari beberapa perincian penelitian terdahulu terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada penggunaan beberapa variabel yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variable dependen yakni Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan SAKIP. Perbedaan selanjutnya terletak pada Subjek Penelitian yakni pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai subjek penelitian. Selain itu dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan., Maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh SPIP terhadap Kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh SPIP terhadap SAKIP?
4. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi SDM terhadap SAKIP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menguji pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menguji pengaruh SPIP terhadap SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk menguji pengaruh Kompetensi SDM terhadap SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pemerintah daerah dalam menjalankan kinerjanya. Tidak hanya dengan melihat nilai dari anggaran yang dipakai, namun bisa dengan mempertimbangkan tujuan atau output dari suatu instansi pemerintah.